



LAPORAN SEMESTER II

TAHUN 2023

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena penyusunan Laporan Semester II Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 6 (enam bulan) kedua atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dan penggerak utama bagi sektor lain dalam pembangunan Provinsi NTT periode 2018-2023. Setelah pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 – 2021, kini industri pariwisata memasuki era pasca pandemi atau New Normal. Walaupun masih diwarnai tantangan namun industri pariwisata NTT mulai kembali bangkit. Alokasi anggaran APBD mengalami tren menurun dalam 3 tahun terakhir, namun tidak menyurutkan langkah Dinas ini untuk berkontribusi dan berkinerja dalam melayani kebutuhan masyarakat terkait kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan adalah melanjutkan dan menyelesaikan rencana kegiatan di tengah keterbatasan keuangan daerah. Dari kelima program yang dijalankan empat program dilaksanakan namun terdapat 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Parekraf tidak dapat dilaksanakan. Sementara untuk kegiatan APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan telah selesai dilaksanakan.

Semoga laporan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabilitas, sehingga apa yang telah kita laksanakan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran dari semua pihak yang kiranya bermanfaat bagi kemajuan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih untuk partisipasi dan dukungan semua staf dan berbagai pihak yang terlibat sehingga berbagai program dan kegiatan selama Semester Kedua tahun anggaran 2023 ini dapat berjalan dengan baik. Semoga kegiatan yang dilakukan bermanfaat bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi NTT dan menjadi referensi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Kupang, 10 Januari 2024





Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

JONI LIE ROHI LODO, S.H

Pembina Tk. I / IV b

NIP 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Parekraf	
Fungsional Perencana Ahli Madya	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I	Pendahuluan	1
II	Gambaran Umum	2
2.1	Dukungan APBD NTT	3
2.2	Dukungan APBN	7
III	Pelaksanaan Kegiatan	8
3.1	Kegiatan APBD	8
3.2	Kegiatan APBN	13
3.3	Hasil Kegiatan dan Pencapaian Kinerja.....	14
3.4	Masalah	17
3.5.	Upaya Pemecahan Masalah	17
IV	Kesimpulan	18
V	Penutup	20

Lampiran 1 : Kurva Rencana dan Realisasi APBD Semester II 2023

Lampiran 2 : Kondisi Pencapaian Indikator Dalam RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

Lampiran 3 : Kondisi Pencapaian IKU sektor Parekraf pada Dinas Parekarf NTT

LAPORAN SEMESTER KEDUA 2023

I. Pendahuluan

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT mendapat tantangan besar sehubungan adanya pandemi global Covid - 19 yang sudah berlangsung sejak 2020 sampai tahun 2022. Tahun 2022 pandemi Covid mulai berangsur hilang dan industri pariwisata mulai bangkit kembali. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling besar mendapatkan dampak tidak terkecuali di Provinsi NTT yang menetapkan sektor pariwisata sebagai *prime mover* (penggerak utama). Kunjungan wisatawan tahun 2019 yang dapat mencapai 1,4 juta menurun drastis menjadi hanya sekitar 650.000 wisatawan selama tahun 2020 dan sekitar 658.000 wisatawan tahun 2021. Tahun 2022, kunjungan wisatawan ke NTT mulai meningkat sampai 1,2 juta wisatawan. Momentum ini yang perlu dijaga dan dipertahankan tahun 2023 yang menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMD NTT Tahun 2018-2023.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi NTT sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menyejahterakan masyarakat NTT, memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar. Bersama-sama dengan para *stake holder* lainnya dalam skema pentaheliks (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media) akan selalu terus berupaya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di era *New Normal*, agar dapat memberdayakan seluruh masyarakat demi peningkatan kualitas hidup mereka.

Pada Tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT akan melakukan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD NTT 2018 – 2023 dan Renstra Perubahan Dinas Parekraf NTT 2018-2023. Berdasarkan Permendagri tersebut, Dinas Parekraf NTT melaksanakan tugas urusan pilihan bidang pariwisata dengan 5 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selama Semester II (Juli-Desember) 2023, Dinas Parekraf Provinsi NTT melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk APBD Secara umum beberapa kegiatan pada semester II belum dapat dilakukan karena kondisi kas daerah yang kosong. Beberapa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berada di bidang teknis. Sementara kegiatan rutin yang dilakukan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tetap berjalan sesuai rencana atau alur kas yang ada. Sementara kegiatan Tugas Pembantuan Dana APBN telah dilakukan sesuai rencana.

II. Gambaran Umum

Kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tahun 2023 dilakukan untuk melanjutkan upaya pemenuhan aspek 5 A Pariwisata pada Kawasan Destinasi Pariwisata Estate (PE), pengembangan kompetensi SDM Parekraf, Promosi wisata NTT dan pengembangan industri ekonomi kreatif di NTT dengan target capaian kinerja sesuai RPJMD NTT Perubahan 2018-2023 dan Renstra Perubahan Dinas Parekraf NTT 2018-2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Kondisi Capaian Kinerja Dinas Parekraf NTT Dalam RPJMD 2018 - 2023

No	Program/Indikator	Kondisi awal (2019)	Target & Realisasi			Kondisi Akhir
			2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	
1.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
	a. Presentasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	-	42,27 %	56,28 %	56,67 %	56,67 %
	b. Peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan Pariwisata Estate	-	79,17 %	75 %	100 %	100 %
2.	Pemasaran Pariwisata					
	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	112,08 %	42,27%	80,21 %	56,67%	56,67 %
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI					
	a. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapat hak paten (HAKI)	-	5 %	53,12 %	10 %	10 %
	b. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	-	93,75%	68,74 %	100 %	100 %
4.	Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	a. Peningkatan cakupan ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut keahlian:					
	- Tour operator	-	79,17 %	0	100 %	100 %
	- Pemandu wisata	-	79,17 %	54,16 %	100 %	100 %
	- Pelaku ekonomi kreatif	-	79,17 %	16,66 %	100 %	100 %
	- Restoran	-	79,17 %	0	100 %	100 %
	- Perhotelan	-	79,17 %	0	100 %	100 %
	- Pramuwisata	-	79,17 %	54,16 %	100 %	100 %
	- Transportasi	-	79,17 %	0	100 %	100 %
	- Informasi	-	79,17 %	0	100 %	100 %
	b. Peningkatan cakupan Pokdarwis pada kawasan Pariwisata Estate (target 24 pokdarwis di tahun 2023)	-	79,17 %	66,67 %	100 %	100 %

Sumber: RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

Tabel 2. Kondisi Capaian Indikator Kinerja Dinas Parekraf NTT Dalam Renstra

No	Indikator	Kondisi awal (2019)	Target dan Realisasi capaian Kinerja			Kondisi Akhir (2023)
			2022		2023	
			Target	Realisasi		
1.	Persentasi Pertumbuhan UMKM Baru di Pariwisata Estate (%)	2	6	48,64 %	8	8
2.	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	1,9 Hari	4	4
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.278.453	1.189.149	1.534.144	1.534.144
4.	Peningkatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset	563.092.000	800.000.000	233.596.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.	Sertifikasi Tenaga Kepariwisataaan	-	300	0	300	900

Sumber: Renstra Perubahan Dinas Parekraf NTT 2018-2023

Untuk itu dibutuhkan dukungan sumber daya meliputi sumber daya manusia, peralatan, regulasi dan sumber daya anggaran. Dukungan anggaran untuk kegiatan Dinas Parekraf Provinsi NTT tahun 2023 berasal dari dana APBD dan APBN (Dana Dekonsentrasi).

2.1. Dukungan APBD NTT

Total anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebesar Rp 11.249.157.790 sesuai DPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor DPA/A.2/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang semuanya meru[akan Belanja Operasi sebesar Rp 11.249.157.790 Sementara untuk Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp 40.600.000.000 yang terdiri dari retribusi daerah Rp 600.000.000 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 40.000.000.000.

Tabel 3. Ringkasan Dokumen DPA SKPD Dinas Parekraf NTT tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Retribusi Daerah	40.600.000.000
2.	Belanja Daerah	11.249.157.790
2.1	Belanja Operasi	11.249.157.790
	a. Belanja Pegawai	7.650.109.630
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.599.048.160
	c. Belanja Hibah	-
2.2.	Belanja Modal	-
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-

Sumber: DPA SKPD Disparekraf NTT TA 2023

Tabel 4. Alokasi Anggaran Belanja Program APBD NTT Dinas Parekraf NTT tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Lokasi	Uraian Keluaran Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.249.157.790		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.143.000		
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.526.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.160.000	Kota Kupang	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.265.000	Kota Kupang	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.705.009.630		Penyediaan gaji, tata usaha dan pengelolaan keuangan, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, dokumen pemeriksaan.
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.603.669.630	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	Kota Kupang	
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.840.000		Data kepegawaian dan system informasi kepegawaian
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.920.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.920.000	Kota Kupang	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.177.000		Penyediaan material dan barang kantor, makan-minum tamu, konsultasi koordinasi SKPD dan kabupaten/kota
	▪ Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	Kota Kupang	
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	23.064.000	Kota Kupang	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.113.000	Jakarta, Jabar	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.777.96		komunikasi, listrik, air kantor, pelayanan umum kantor
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.230.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.547.960	Kota Kupang	
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.580.000		Jasa pemeliharaan kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	Kota Kupang	

	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.580.000	Kota Kupang	
2	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	357.863.700		
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	357.863.700		
	▪ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	91.000.000	Kab. Matim, Nagekeo, Sikka, Sumba Barat, TTU	Perencanaan fasilitas amenita di PE
	▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.011.500	Kab. Matim, Nagekeo, Sikka, Sumba Barat, TTU	Monitoring pengelolaan fasilitas Homestay di 5 PE
	▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201.852.200	Kab. Ende, TTS, Sikka, Sumba Barat	Workshop pengembangan seni budaya, pentas musik dan tari, dukungan dana kegiatan, pentas musik dan tari
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.093.063.700		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.093.063.700		
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	61.063.700	Kota Kupang,	Wallpaper di TIC Bandara El Tari Kupang
	▪ Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	932.000.000	Kota Kupang	Festival Kupang
	▪ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	Kota Kupang	Pameran pontesi pariwisata,
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	371.428.620		
	a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	371.428.620		
	▪ Fasilitas Kekayaan Intelektual	371.428.620	Kab. Belu, Flotim. Mabar, Nagekeo, TTU, Kota Kupang, Jakarta	Fasilitas HKI, Festival Kreatif, Pelatihan digital marketing.
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180		
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	178.176.180		
	▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	41.785.180	Kab. Belu, Malaka	Penguatan Pokdarwis
	▪ Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136.391.000	Kota Kupang,	Sertifikasi pekerja sektor restoran 50 orang
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	86.098.000		Sertifikasi kompetensi tenaga Barista 15 orang
	▪ Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86.098.000	Kota Kupang,	
	Jumlah	11.249.157.790		

Sumber: hasil olahan, 2023

Target penerimaan Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Rp 40.600.000.000

Tabel 5. Rincian Target Pendapatan Dinas Parekraf NTT tahun 2023

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Rumah Dinas)	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	500.000.000	500.000.000
3	Lain – Lain PAD yang sah	1	Tahun	40.000.000.000	40.000.000.000
					40.600.000.000

Sumber: DPA SKPD Disparekraf NTT TA 2023

Sementara untuk melaksanakan kegiatan maka disusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan realisasi keuangan atau penyerapan anggaran setiap bulan (arus kas) dan menjadi dasar kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan. Secara garis besar rencana realisasi penyerapan anggaran setiap bulan sebagai berikut:

Tabel 6. Target Realisasi Keuangan Bulanan APBD Disparekraf NTT tahun 2023

Uraian	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni
Rp	827.293.962	1.583.960.924	2.629.186.166	3.683.298.528	4.771.126.290	5.774.888.272
%	7,35	14,08	23,37	32,74	42,41	51,34
Uraian	Juli	Agust	Sept	Oktober	Nov	Des
Rp	6.527.801.734	8.209.871.196	8.968.904.858	9.722.670.020	10.486.851.182	11.249.157.790
%	58,03	72,98	79,73	86,43	93,22	100

Sumber: DPPA SKPD, 2023

Tabel 7 . Kurva Rencana Realisasi APBD Dinas Parekraf NTT tahun 2023

NO	PROGRAM	Jumlah (Rp)	%	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.162.527.590	81,45													100
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	357.863.700	3,18													75
3	PEMASARAN PARIWISATA	1.093.063.700	9,72													
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	371.428.620	3,30													50
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	264.274.180	2,35													25
	Jumlah 1,2,3,4,5	11.249.157.790	100,00													0
	Rencana Realisasi Per Bulan			827.293.962	756.666.962	1.045.225.242	1.054.112.362	1.087.827.762	1.003.761.982	752.913.462	1.682.069.462	759.033.662	753.765.162	764.181.162	757.569.608	
	Total Rencana Realisasi Per Bulan			827.293.962	1.583.960.924	2.629.186.166	3.683.298.528	4.771.126.290	5.774.888.272	6.527.801.734	8.209.871.196	8.968.904.858	9.722.670.020	10.486.851.182	11.249.157.790	
	Prosentasi Rencana			7,35	14,08	23,37	32,74	42,41	51,34	58,03	72,98	79,73	86,43	93,22	100,00	

Sumber: Hasil olahan, 2023

2.2. Dukungan APBN

Total anggaran Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2023 untuk Provinsi NTT sebesar Rp 1.385.000.000 sesuai DIPA Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor SP DIPA -040.01.4.640030/2023 tanggal 30 November 2022 pada Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (4 Kegiatan) dan Program Dukungan Manajemen (1 kegiatan).

Tabel 8. Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Parekraf NTT tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Uraian
	Program Kepariwisata dan Ekraf		
1.	Pengembangan SDM Pariwisata		
	a. Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata	87.500.000	Pelatihan SDM kepariwisataan sebanyak 50 orang
2.	SDM Ekonomi Kreatif		
	a. Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata	87.500.000	Pelatihan SDM kepariwisataan sebanyak 50 orang
3.	Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		
	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	600.000.000	Pengelolaan system t informasi pariwisata
4.	Pengembangan Penyelenggaran Event		
	Penyelenggaraan Kegiatan event daerah	500.000.000	Kegiatan event festival kepariwisataan
	Progeam Dukungan Manajemen		
1.	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan		
	Administrasi	110.000.000	Dukungan Pengelolaan Manajemen dan administrasi program
	Total	1.385.000.000	

Sumber: Kemenparekraf RI, 2023

III. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Parekraf NTT selama Semester 2 sebagai berikut:

3.1. Kegiatan APBD

Alokasi anggaran APBD untuk Dinas Parekraf NTT mengalami pergeseran dan penyesuaian kembali sebanyak 2 kali dalam Semester 1. Penyesuaian pertama pada bulan Maret 2023 dari Rp 11.249.157.790 menjadi Rp 11.258.744.590. Kemudian bulan Juni 2023 mengalami perubahan menjadi Rp 11.358.744.390. Realisasi pelaksanaan anggaran menggunakan anggaran terakhir. Kemudian dalam Semester 2 terjadi perubahan anggaran melalui mekanisme APBD Perubahan menjadi Rp 10.521.011.760. Sementara untuk target penerimaan dari pengelolaan aset mengalami perubahan menjadi Rp 2.850.599.967.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Belanja APBD Sampai Bulan Desember 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa	Uraian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8.489.418.160	7.948.882.094	541.336.066	Dokumen perencanaan, Gaji pegawai, rapat dan koordinasi, dukungan peralatan kantor, listrik, air
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	446.134.000	152.311.800	293.822.200	Penilaian Aset di Kawasan PE (wolwal dan Pramadita)
3.	Program Pemasaran Pariwisata	949.756.800	60.000.000	1.096.063.700	Promosi dukungan ASEAN Summit
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	371.428.620	163.762.385	207.666.235	Penyusunan Perda Ekonomi Kreatif dan fasilitasi HKI di 3 kabupaten (Mabar, Flotim, Nagekeo)
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	-	264.274.180	Kegiatan tidak dilaksanakan
	Jumlah	10.521.011.760	8.324.156.279	2.196.855.481	

Sumber: sub bagian Keuangan, 2023

Tabel 10. Realisasi Anggaran Belanja APBD Selama Semester I 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Jan	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.209.114.190	773.719.254	968.852.060	1.492.951.820	2.355.237.399	3.074.319.434	3.987.651.150
2.	Program Peningkatan Daya Tarik	357.863.700	0	0	0	0	0	0

	Destinasi Pariwisata							
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.156.063.700	0	0	0	0	0	60.000.000
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	371.428.620	0	0	0	0	2.500.000	41.617.285
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	11.358.744.390	773.719.254	968.852.060	1.492.951.820	2.355.237.399	3.076.819.434	4.089.268.435

Sumber: sub bagian Keuangan, 2023

Tabel 10. Realisasi Anggaran Belanja APBD Selama Semester 2 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Juli	Agustus	September	Oktober	Nov	Des
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.209.114.190 (8.489.418.160)	4.827.828.613	5.272.282.004	5.832.530.537	6.585.817.388	7.229.413.909	7.948.882.094
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	357.863.700 (446.134.000)	-	-	-	-	-	152.311.800
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.156.063.700 (949.756.800)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	371.428.620	50.344.085	113.047.385	113.047.385	113.047.385	113.047.385	113.047.385
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	11.358.744.390 (10.521.011.760)	4.938.172.698	5.445.329.389	6.005.577.922	6.758.864.773	7.402.461.294	8.324.156.279

Sumber: sub bagian Keuangan, 2023

Catatan :

angka dalam kurung adalah anggaran perubahan. Sejak November, realisasi sesuai anggaran perubahan

Secara umum kegiatan lebih banyak dilakukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi .

Januari 2023

Kegiatan rutin melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya belum dilakukan dan masih pada tahap persiapan

Pebruari 2023

Kegiatan rutin melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya belum dilakukan karena beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena masih ada tanda bintang dan pengajuan anggaran tidak disetujui karena kondisi kas daerah lagi terbatas.

Maret 2023

Kegiatan rutin melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya belum dilakukan karena beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena masih ada tanda bintang dan pengajuan anggaran tidak disetujui karena kondisi kas daerah lagi terbatas, Telah dilakukan upaya untuk menggugurkan tanda bintang melalui pemenuhan kriteria seperti penyampaian standar harga satuan dan rincian RAB masing-masing aktivitas kegiatan yang disyaratakan Badan Keuangan Daerah. Ada perubahan aloaksi anggaran dalam Pergub 2.

April 2023

Kegiatan rutin melalui Program **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** sementara program lainnya belum dilakukan karena beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena masih ada tanda bintang dan pengajuan anggaran tidak disetujui karena kondisi kas daerah lagi terbatas.

Proses pengumpulan standar harga satuan dan rincian RAB masing-masing aktivitas kegiatan yang disyaratakan Badan Keuangan Daerah berjalan lambat karena tidak ada respon yang baik dari penanggung jawab kegiatan. Disamping itu ada usulan perbaikan dan pergeseran anggaran yang dilakukan untuk mengakomodir perubahan rencana kegiatan seperti perubahan lokasi dan jumlah orang dan adanya kegiatan baru yang mendesak seperti dukungan pelaksanaan ASEAN Summit 2023.

Sementara kegiatan lainnya yang diajukan tidak disetujui karena kondisi kas daerah lagi terbatas.

Mei 2023

Ada proses perubahan alokasi APBD menjadi Pergub 2 yang diterima pada bulan mei 2023. Alokasi anggaran menjadi Rp 11.258.744.590 ada pergeseran /penambahan apda Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Selanjutnya adanya tambahan angaran untuk ASEAN Summit 2023 yang akan dialokasikan dalam rancangan perubahan anggaran selanjutnya.

Kegiatan untuk proses gugur bintang beberapa kegiatan udah dilakukan dan disetujui dan akan ubah dalam Pergub 3.

Kegiatan rutin tetap dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya belum dilakukan karena beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena masih ada tanda bintang dan pengajuan anggaran tidak disetujui

karena kondisi kas daerah lagi terbatas. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI sudah mulai dilakukan dengan rapat persiapan penyusunan Perda Ekonomi Kreatif.

Juni 2023

Kegiatan rutin tetap dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya khususnya program pada bidang sudah mulai berjalan seperti kegiatan penyusunan Perda Ekonomi Kreatif pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI. Program Pemasaran sudah dilakukan kegiatan mendukung ASEAN SUMMIT bulan Mei 2023 lalu.

Juli 2023

Kegiatan rutin tetap dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya belum berjalan kecuali Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI yaitu kegiatan penyusunan Perda Ekonomi Kreatif. Deviasi pelaksanaan program tetap besar karena 3 program lainnya belum dapat dilaksanakan sampai saat ini.

Agustus 2023

Kegiatan rutin tetap dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya belum berjalan kecuali Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI yaitu kegiatan penyusunan Perda Ekonomi Kreatif. Deviasi pelaksanaan program semakin besar pada bulan Juli 2023 tercatat -14,55 dan menjadi -25,05 pada bulan Agustus 2023, karena 3 program lainnya belum dapat dilaksanakan sampai saat ini.

September 2023

Kegiatan rutin tetap dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya belum berjalan kecuali Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI yaitu kegiatan penyusunan Perda Ekonomi Kreatif. Deviasi pelaksanaan program semakin besar pada bulan Agustus 2023 tercatat -25,05 dan menjadi -26,86 pada bulan September 2023, karena 3 program lainnya belum dapat dilaksanakan sampai saat ini.

Sementara kegiatan Tugas Pembantuan untuk APBN telah berjalan dan menyelesaikan berbagai kegiatan pada bulan September 2023.

Oktober 2023

Kegiatan rutin tetap dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sementara program lainnya belum berjalan kecuali Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI yaitu kegiatan penyusunan Perda Ekonomi Kreatif. Deviasi pelaksanaan program berhasil ditekan agar tidak terus meningkat dimana pada bulan September 2023 tercatat -26,86 dan menjadi -26,93 pada bulan Oktober 2023, karena 3 program lainnya belum dapat dilaksanakan sampai saat ini.

Sementara kegiatan Tugas Pembantuan untuk APBN telah berjalan dan menyelesaikan berbagai kegiatan pada bulan Oktober 2023 yang masih menyisakan kegiatan dukungan manajemen untuk penyelesaian laporan.

November 2023

Kegiatan rutin tetap dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi termasuk kegiatan rehabilitasi pagar kantor dinas. Sementara program lainnya belum berjalan kecuali Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan

Perlindungan HAKI yaitu kegiatan penyusunan Perda Ekonomi Kreatif. Alokasi anggaran mengalai perubahan sesuai DPA APBD Perubahan 2023 dari Rp 11.358.744.390 menjadi Rp 10.521.011.760. Deviasi pelaksanaan program berhasil ditekan agar tidak terus meningkat dimana pada bulan Oktober 2023 tercatat -26,93 dan menjadi -22,87 pada bulan November 2023, namun ketiga program lainnya belum dapat dilaksanakan sampai saat ini. Sementara kegiatan Tugas Pembantuan untuk APBN telah berjalan dan menyelesaikan berbagai kegiatan pada bulan Oktober 2023 yang masih menyisakan kegiatan dukungan manajemen untuk penyelesaian laporan.

Desember 2023

Kegiatan rutin tetap dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi termasuk kegiatan rehabilitasi pagar kantor dinas. Namun masih ada alokasi anggaran yang tidak terserap yaitu Tunjangan Jabatan Fungsional. Sementara program lainnya sudah berjalan namun tidak maksimal seperti Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI. Sementara kegiatan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak berjalan. Ini berakibat realisasi program APBD dibawah 80 %. Sementara kegiatan Tugas Pembantuan untuk APBN telah berjalan sesuai rencana.

Realisasi pendapatan terhadap aset yang dikelola sampai bulan Desember 2023 mencapai Rp 469.262.880 atau 16,46 % . Pada bulan Novemembr terjadi perubahan target penerimaan dari Rp 40.600.000.000 menjadi Rp 2.850.599.967 . Target ini terdiri dari 2 pos penerimaan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 500.000.000 dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp 2,350.599.967. Data realisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi Semester 2 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Juli	Agustus	September	Okt	Nov*	Des*
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000.000						
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (7 Rumah Dinas, 1 unit Kantin, pusat kuliner)		18.850.000	21.950.000	22.700.000	25.450.000	29.050.000	39.400.000
b.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		130.657.000	148.505.000	159.510.000	175.883.000	204.099.000	234.436.000
	Pantai Lasiana		104.181.000	121.967.000	132.972.000	149.195.000	177.261.000	
	Kampung Seni Flobamorata		26.476.000	26.538.000	26.538.000	26.688.000	26.838.000	
c.	6 Kawasan PE		74.278.000	74.278.000	74.278.000	164.278.000	192.322.880	195.426.880
2	Lain-Lain PAD yang sah	40.000.000.000	-	-	-	-	-	-
	Rekapitulasi	40.600.000.000	223.785.000	244.733.000	256.488.000	365.611.000	425.471.880	469.262.880

- Target penerimaan berubah
- Sumber: sub bagian keuangan, 2023

3.2. Kegiatan APBN

Kegiatan APBN untuk Dana Tugas Pembantuan telah selesai dilakukan pada bulan November 2023.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Parekraf NTT Semester II 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Uraian
A	Program Kepariwisata dan Ekraf				
1.	Pengembangan SDM Pariwisata				
	a. Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata	87.500.000	3.114.000	84.386.000	Rencana Pelatihan SDM kepariwisataan sebanyak 50 orang
2.	SDM Ekonomi Kreatif				
	a. Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata	87.500.000	1.662.000	85.838.000	Rencana Pelatihan SDM kepariwisataan sebanyak 50 orang
3.	Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	600.000.000	16.927.802	583.072.198	Pengelolaan system informasi pariwisata
4.	Pengembangan Penyelenggaraan Event				
	Penyelenggaraan Kegiatan event daerah	500.000.000	37.163.000	462.837.000	Rencana Kegiatan Bimtek penyelenggaraan event festival kepariwisataan
B	Progeam Dukungan Manajemen				
1.	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan				
	Administrasi	110.000.000	47.231.010	62.768.990	Dukungan Pengelolaan Manajemen dan administrasi program
	Total	1.385.000.000	106.097.812	1.278.902.188	

Sumber: Pengelola TP Dinas Parekraf NTT, 2023

3.3. Hasil Kegiatan dan Pencapaian Kinerja

1. Pencapaian Kinerja Dinas

a. Kinerja Dinas Dalam RPJMD Perubahan

Tabel 13. Kondisi Capaian Kinerja Dinas Parekraf NTT Dalam RPJMD Perubahan

No	Program/Indikator	Kondisi awal (2019)	Target & Realisasi Capaian Kinerja				Kondisi Akhir
			2022		2023	Realisasi Semester II	
			Target	Realisasi	Target		
1.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
	a. Presentasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	-	42,27 %	56,28 %	56,67 %	95,43 %	56,67 %
	b. Peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan Pariwisata Estate	-	79,17 %	87,50 %	100 %	87,50 %	100 %
2.	Pemasaran Pariwisata						
	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	112,08 %	42,27%	80,21 %	56,67%	36,64 %	56,67 %
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI						
	a. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapat hak paten (HAKI)	-	5 %	53,12 %	10 %	53,12 %	10 %
	b. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	-	93,75%	68,74 %	100%	68,74%	100 %
4.	Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
	a. Peningkatan cakupan ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut keahlian:						
	- Tour operator	-	79,17 %	0	100 %	12,50 %	100 %
	- Pemandu wisata	-	79,17 %	54,16 %	100 %	54,16%	100 %
	- Pelaku ekonomi kreatif	-	79,17 %	16,66 %	100 %	16,66%	100 %
	- Restoran	-	79,17 %	0	100 %	0	100 %
	- Perhotelan	-	79,17 %	0	100 %	0	100 %
	- Pramuwisata	-	79,17 %	54,16 %	100 %	54,16 %	100 %
	- Transportasi	-	79,17 %	0	100 %	0	100 %
	- Informasi	-	79,17 %	0	100 %	0	100
	b. Peningkatan cakupan Pokdarwis pada kawasan Pariwisata Estate (target 24 pokdarwis di tahun 2023)	-	79,17 %	79,17 %	100 %	79,17 %	100 %

Sumber: Hasil olahan, 2023

Kunjungan wisatawan di 7 PE tahun 2023 sebanyak 770 wisatawan tercatat dari 2 Kawasan PE yaitu Cottage PE Koanara sebanyak 417 orang dan PE Wolwal sebanyak 353 orang. Kunjungan wisatawan yang dimaksud adalah wisatawan yang menginap pada fasilitas yang terbangun di Kawasan PE. Sementara tahun 2022 sebanyak 394 orang.

Cakupan desa wisata pada Kawasan PE tahun 2022 sudah ada 21 Desa Wisata di Kawasan PE dari target 24 Desa Wisata dan untuk tahun 2023 belum ada tambahan.

Untuk jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapat HKI terdapat 34 produk ekraf dari 11 sub sektor dari target 64 produk ekraf dari 16 sub sector yang ada. Untuk peningkatan kompetensi pelaku SDM Parekraf belum ada tambahan karena kegiatan tidak dilaksanakan. Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) tahun 2022 sudah ada 19 pokdarwis di 19 kabupaten dan belum ada tambahan sampai semester II 2023.

b. Kinerja Dinas Dalam Renstra Perubahan

Tabel 12. Kondisi Capaian Indikator Kinerja Dinas Parekraf NTT Dalam Renstra Perubahan

No	Indikator	Kondisi awal (2019)	Target dan Realisasi capaian Kinerja				Kondisi Akhir (2023)
			2022		2023	Semester II	
			Target	Realisasi			
1.	Persentasi Pertumbuhan UMKM Baru di Pariwisata Estate (%)	2	6	48,64 %	8	25,45	8
2.	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	1,9 Hari	4	2,01	4
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.278.453	1.189.149	1.534.144	1.624.891	1.534.144
4.	Peningkatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset	563.092.000	800.000.000	233.596.000	1.000.000.000	469.262.880	1.000.000.000
5.	Sertifikasi Tenaga Kepariwisata	-	300	0	300	0	900

Sumber: Hasil Olahan, 2023

UMKM yang tumbuh di 7 kawasan PE sampai tahun 2022 sebanyak 55 UMKM, sementara untuk tahun 2023 ada penambahan UMKM Ekraf yang baru sebanyak 14 UMKM di 14 Kawasan PE. Sementara jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.624.891 wisatawan yang merupakan data dari kabupaten/kota dan lama tinggal wisatawan rata-rata 2,01 hari. Untuk pengelolaan aset, penerimaan rendah hanya karena pos PAD lain-lain yang sah dengan target sebesar Rp 1,350 Milyar tidak ada realisasinya. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Bidang Kelembagaan tidak terlaksana, sehingga belum ada penambahan tenaga kepariwisataan yang disertifikasi oleh Dinas Parekraf Provinsi NTT.

c. Pencapaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Volume	Lokasi	Realisasi	Keterangan
1.	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5 A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate	a. Persentase pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan PE	80 %	14 Lokasi PE	71,43 Persen	
		b. Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara per tahun	100.000 orang	22 kab/kota	319.573 orang	Data 22 kab/kota
		c. Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara per tahun	800.000 orang	22 kab/kota	1.305.318 orang	Data 22 kab/kota
2.	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	a. Persentasi Pertumbuhan UMKM baru bidang Parekraf di Pariwisata Estate	8 %	14 Lokasi PE	25,45 persen	Tambahan 14 UMKM
		b. Lama Tinggal Wisatawan	4 Hari	22 Kab/kota	2,01 Hari	Data dari beberapa kabupaten

		c. Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset	Rp 1.280.899.967	3 lokasi	469.262.880	Kupang dan 2 PE
4.	Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing;	Terwujudnya Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing;	Minimal 40 % dari pagu anggaran belanja barang dan jasa	Kupang	0,15 %	
5.		Tersedianya dokumen LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 28 Februari 2023;	3 dokumen	Kupang	3 Dokumen	LPPD,LKPJ,LA KIP
6.	Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);	Tercapainya Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB	70	Kupang	79,64	Data tahun 2021
7.	Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;	Terealisasinya Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;	90 %	Kupang	98 %	
8.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :					
	a. TL temuan tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%	Tindak lanjut temuan administrasi tahun 2022	100 %	Kupang	90 %	
		Tindak lanjut temuan keuangan tahun 2022	80 %	Kupang	80 %	
	b. TL temuan dibawah tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%;	Tindak lanjut temuan administrasi dibawah tahun 2022	100 %	Kupang	85 %	
		Tindak lanjut temuan keuangan dibawah tahun 2022	80 %	Kupang	80 %	
9.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 2 (dua)	Tersedianya Inovasi Perangkat Daerah minimal 2 (dua)	Minimal 2 Inovasi	Kupang	2	Sekretariat dan Bidang Destinasi
10.	Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;	Terwujudnya Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;	Penerapan TTE Naskah Dinas melalui aplikasi Srikandi paling lambat Januari 2023	Kupang	Terlaksananya pada Januari 2023	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal	76,61	Kupang	Baik (86,13)	

	Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);	Kategori Baik (76,61-88,30);				
12.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif;	Tercapainya Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif;	75	Kupang	Menuju Informatif	
13.	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.	Tersedianya Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah	minimal 1 (satu) Kerjasama		4 (empat) Kerjasama	FTS Undana, Pegadaian Galeri 24 Regional Denpasar (Distro Kupang), PT. Angakasa Pura I Kupang, Prodi Ilmu Administrasi Negara UNDANA

Sumber: Hasil olahan , 2024

3.4. Masalah

1. Pelaksanaan kegiatan APBD tidak mencapai target sesuai rencana arus kas yang ada sehingga ada deviasi minus cukup besar karena banyak kegiatan tidak dapat dilakukan karena pengajuan anggaran ditolak Badan Keuangan Daerah akibat kondisi kas daerah yang terbatas.
2. Pengelolaan Kampung Seni Flobamorata Kupang belum optimal sehingga pendapatan retribusi tidak maksimal dan beberapa fasilitas pendukung di kawasan wisata tersebut rusak akibat Siklon Seroja. Sementara pengajuan permohonan perhitungan kembali nilai aset di kedua Kawasan wisata yang dikelola belum ditanggapi oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
3. Realisasi penerimaan dari hasil pengelolaan aset masih rendah karena realisasi dari pos PAD lain-lain tidak ada dari target sebesar Rp 2,350 Milyar. Disamping itu 3 Kawasan PE lain (PE Liman, PE Fatumnasi dan PE Praimadita) tidak dapat berkontribusi sampai akhir Desember 2023
4. Belanja e-purchasing yang dilakukan masih rendah.
5. Data-data kepariwisataan dan ekonomi kreatif khususnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal belum lengkap diterima atau sering terlambat dari kabupaten.
6. Laporan Kegiatan dari Sekretariat/Bidang khususnya Laporan Akhir Tahun tidak menyampaikan penggunaan keuangan dari setiap kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan beserta rincian kode belanja anggaranya, hanya menyampaikan total anggaran, realisasi dan sisa dana.

3.5. Upaya Pemecahan Masalah

1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan dapat dilakukan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Penilaian aset / appraisal mulai dilakukan tahun 2023 namun belum dilakukan untuk Kampung Seni Flobamorata Kupang sehingga perlu direncanakan kegiatan Appraisal untuk dilakukan tahun 2024.
3. Menyusun profil atau rencana penerimaan aset yang dikelola yang menggambarkan data profil aset dan target penerimaan setiap aset dalam satu tahun baik yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maupun dari Lain-Lain PAD yang sah.
4. Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan dukungan belanja pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme e-purchasing pada tahun berikutnya.
5. Koordinasi dengan pihak kabupaten /kota perlu tetap dilaksanakan dan lebih ditingkatkan melalui pertemuan secara daring minimal pada awal dan akhir tahun anggaran berjalan.
6. Setiap Bidang / Sekretariat perlu menyusun rencana kerja tahunan dan laporan hasil kerjanya dalam bentuk laporan triwulan/Semester dan Laporan Akhir. Laporan ini disamping menginformasikan pelaksanaan tugas yang dibiayai APBD dan APBN juga dilengkapi dengan hasil realisasi keuangan setiap kegiatan/sub kegiatan/aktivitas dengan rincian anggaran setiap kode belanja.

IV. Kesimpulan

1. Alokasi anggaran Dinas Parekraf NTT tahun anggaran sesuai DPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT DPA/A.2/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp 11.249.157.790. Sementara untuk target penerimaan atau Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tahun 2023 sebesar Rp 40.600.000.000.
2. Alokasi anggaran APBD mengalami perubahan dan sampai Semester II sudah terjadi 3 kali perubahan dan perubahan terakhir melalui APBD Perubahan menjadi Rp 10.521.011.760, sementara target penerimaan berubah menjadi Rp 2.850.599.967.
3. Rencana alokasi anggaran APBN / Tugas Pembantuan untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tahun 2023 sebesar Rp 1.385.000.
4. Realisasi APBD NTT sampai Semester I (Juni 2023) adalah sebesar Rp 4.089.268.435 atau 36 % dan sisa dana Rp 7.269.475.955. dan Semester II (Desember 2023) Realisasi sebesar RP 8.324.156.279 dengan sisa dana Rp 2.196.855.481. Realisasi 79,11 % (dibawah 80 %) karena anggaran yang sudah disiapkan tidak dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah yang terbatas.
5. Realisasi penerimaan Dinas Parekraf NTT sampai bulan Juni 2023 mencapai Rp 197.558.000 atau 0,49 % dari target Rp 40.600.000.000. Sementara pada Semester 2 Realisasi penerimaan mencapai Rp 469.262.880 dari target Rp 2.850.599.967. Pemasukan atau kontribusi terbesar dari Retribusi Pantai Wisata Lasiana. Realisasi

rendah karena hanya 16,46 %. Faktor utama karena penerimaan dari pos terbesar yaitu PAD Lain-Lain yang sah sebesar Rp 2,350 Milyar tidak terealisasi.

6. Realisasi Dana Tugas Pembantuan Dinas Parekraf NTT Tahun 2023 sebesar Rp 1.369.479.021 atau 98,88 % dan ada sisa anggaran sebesar Rp 15.520.979.

7. Pencapaian kinerja Dinas

a. Indikator dalam RPJMD

Pencapaian indikator kinerja sesuai RPJMD terdapat 2 indikator yang mencapai target (Presentasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata yang mendapatkan program peningkatan dan Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapat hak paten (HAKI)) dan 5 indikator belum tercapai. Namun indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kapasitas SDM Parekraf bersertifikasi. Hal ini terjadi karena kegiatan tidak dilaksanakan dan dukungan data kegiatan sertifikasi dari kabupaten belum ada. Sementara 4 indikator lainnya capaiannya sudah mendekati target yang direncanakan.

b. Indikator dalam Renstra Dinas

Pencapaian indikator kinerja sesuai Renstra, terdapat 2 (dua) indikator yang sudah tercapai (Persentasi Pertumbuhan UMKM Baru di Pariwisata Estate dan kunjungan wisatawan) dan 3 (tiga) indikatornya belum tercapai. Indikator yang perlu mendapat perhatian karena capaiannya masih rendah adalah lama tinggal wisatawan, Peningkatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset serta Sertifikasi Tenaga Kepariwisata.

c. Perjanjian Kinerja

Secara umum sebagian besar indikator kinerja dalam perjanjian kinerja sudah dapat memenuhi target dan indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian khusus karena masih dibawah target adalah Penerimaan Pengelolaan Aset dan Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing

8. Data kunjungan wisatawan ke NTT sampai Desember 2023 sebanyak 1.624.891 wisatawan yang terdiri dari wisman sebanyak 319.573 orang dan wisnus sebanyak 1.305.318 orang.

V. Penutup

Demikian laporan Semester II ini disampaikan kepada Bapak Penjabat Gubernur sebagai bahan pertanggungjawaban dan menjadi referensi untuk pelaksanaan tugas pada selanjutnya. Atas arahan dan bimbingan Bapak Penjabat Gubernur selanjutnya, kami haturkan terima kasih.

Kupang, 10 Januari 2024





Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

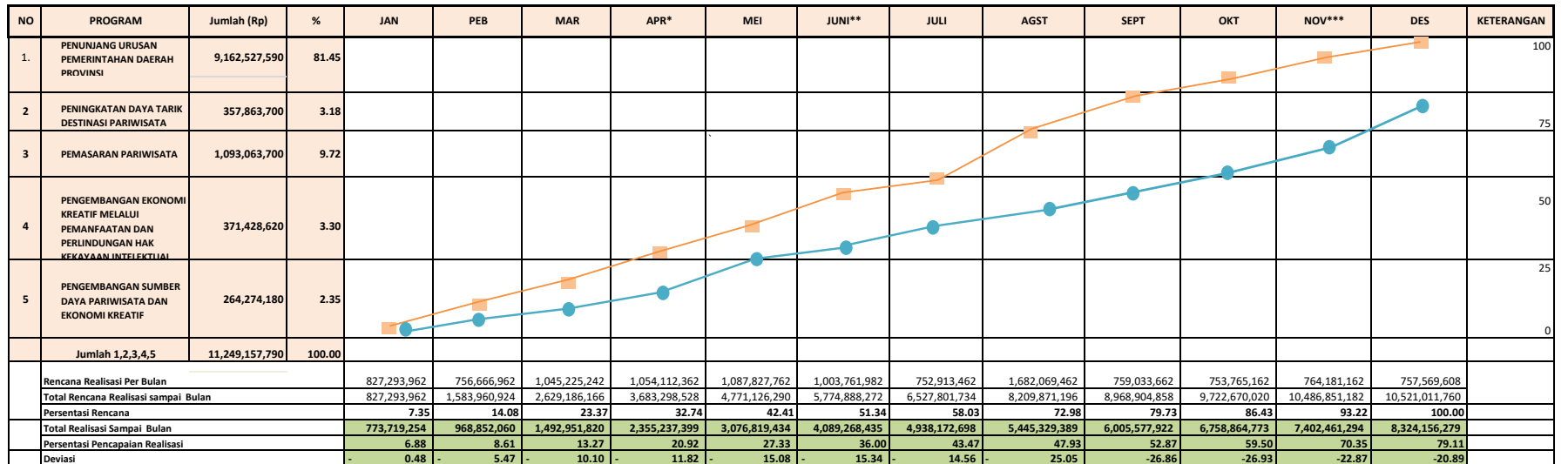
JOHN LIE ROHI LODO, S.H

Pembina Tk. I / IV b

NIP 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Parekraf	
Fungsional Perencana Ahli Madya	

KURVA RENCANA DAN REALISASI APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2023



*Pergub 1 11,258,744,590
 **Pergub 2 11,358,744,390
 *** APBD Perubahan 10,521,011,760

Kupang, 10 Januari 2024
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Provinsi Nusa Tenggara Timur.


 Dit. E. Rohi Lodo, SH
 Pembina Tk. I/IV b
 NIP. 1967071719993031016

**KONDISI PENCAPAIAN INDIKATOR SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DALAM RPJMD PERUBAHAN NTT SEMESTER 2 (JULI - DESEMBER) TAHUN 2023**

1. Kondisi dan Evaluasi

No	Program/Indikator	Kondisi awal (2019)	Target & Realisasi Capaian Kinerja				Kondisi Akhir
			2022		2023	Realisasi Semester 2	
			Target	Realisasi	Target		
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
	a. Presentasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	-	42.27%	56.28%	56.67%	95.43%	56,67 %
		Kunjungan dan menginap tahun 2023 di Cottage PE Koanara sebanyak 417 orang dan PE Wolwal sebanyak 353 orang. Total yang menginap sebanyak 770 orang sementara data tahun 2022 sebanyak 394 orang. Persentase peningkatan jumlah kunjungan menjadi (770-394)/ 394 dikali 100 % atau 95,43 %. Data ini hanya dari 2 Kawasan PE saja sementara 4 Kawasan PE lainnya belum ada data kunjungan.					
	b. Peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan Pariwisata Estate	-	79.17%	87.50%	100%	87.50%	100%
		Sudah ada 21 desa wisata di Kawasan PE terdiri dari 6 desa wisata di Kawasan PE terbangun dan 15 desa wisata di calon Kawasan PE. Peningkatan cakupan mencapai 21/24 atau 87,50 %.					
2	Pemasaran Pariwisata						
	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	112,08 %	42.27%	65.62 %	56.67%	36.64%	56,67 %
		Kunjungan wisatawan 1.624.891 orang yang terdiri dari wisman 319.573 orang dan wisnus 1.305.318 orang . Kunjungan tahun 2022 sebanyak 1.189.149. Pertumbuhan dari tahun lalu sebesar 36,64 %.					
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI						
	a. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapat hak paten (HAKI)	-	5%	53.12%	10%	53.12%	10 %
		Produk ekraf yang mendapat HKI belum ada karena masih dalam proses , namun data tahun lalu sudah ada sebanyak 34 produk ekraf dari 11 subsektor. Asumsi target 64 produk ekraf yang mendapat HKI sehingga cakupan produk ekraf mencapai 53,12 %					
	b. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	-	93.75%	68.74%	100%	68.74%	100%
		Tercatat 11 sub sektor ekraf yang mendapat perlindungan dari 16 sub sektor ekraf yang ada atau 68,74 %					
4	Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
	a. Peningkatan cakupan ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut keahlian:						
	- Tour operator	-	79,17 %	0	100%	12.5	100%
	- Pemandu wisata	-	79,17 %	54.16%	100%	54.16%	100%
	- Pelaku ekonomi kreatif	-	79,17 %	16.66%	100%	16.66%	100%
	- Restoran	-	79,17 %	0	100%	0	100%
	- Perhotelan	-	79,17 %	0	100%	0	100%
	- Pramuwisata	-	79,17 %	54.16%	100%	54.16%	100%
	- Transportasi	-	79,17 %	0	100%	0	100%
	- Informasi	-	79,17 %	0	100 %	0	100 %
		Peningkatan ketersediaan SDM pariwisata dan ekraf belum ada tahun ini. Data tahun lalu pemandu wisata ada di 13 kabupaten atau Kawasan PE, pelaku ekraf dari arsitek di 4 kabupaten dan tour operator ada di 3 kabupaten.					
	b. Peningkatan cakupan Pokdarwis pada kawasan Pariwisata Estate (target 24 pokdarwis di tahun 2023)	-	79,17 &	79.17 %	100%	79.17 %	100%
		Belum ada penambahan pokdarwis dan masih sama seperti tahun lalu dengan 19 pokdarwis di 19 kabupaten					

2. Saran Rekomendasi Tindak Lanjut

- Penyempurnaan pengelolaan data kunjungan di Kawasan PE meliputi mewajibkan pengelola atau yang ditunjuk di lokasi untuk memberikan laporan secara tertulis dan penanggung jawab pengelolaan internal Dinas.
- Desa di kawasan PE terbangun yang belum ditetapkan menjadi desa wisata adalah Desa Wolwal Kabupaten Alor, sehingga perlu mendapatkan SK Bupati Penetapan Desa Wisata
- Koordinasi dengan pihak kabupaten/kota tetap dilakukan dan mencari sumber data lainnya misalnya dari asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti untuk hotel (PHRI) dan agen perjalanan (ASITA)
- Disamping melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai alokasi anggaran yang ada, perlu juga dilakukan pencarian data dan informasi kegiatan sertifikasi pelaku usaha parekaf yang dilakukan pihak lain baik pusat, kabupaten/kota atau asosiasi profesi pelaku usaha pariwisata yang ada
- Pencarian data dan informasi 5 pokdarwis baru di 5 calon kawasan PE lain dilakukan dengan koordinasi dengan Dinas Pariwisata kabupaten setempat.

Kupang, 10 Januari 2024

Pt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Jon Lie Rohi Lodo,SH
Pembina Tk. I
NIP.196707171993031016

**KONDISI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DINAS PAREKRAF PROVINSI NTT - SEMESTER 2 (JULI - DESEMBER) 2023**

1. Kondisi dan Evaluasi

No	Indikator	Kondisi awal (2019)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja				Kondisi Akhir (2023)
			2022		2023	Semester 2	
			Target	Realisasi	Target		
1	Persentasi Pertumbuhan UMKM Baru di Pariwisata Estate (%)	2	6	48.64%	8	25.45%	8
		Data tahun 2022 sebanyak 55 UMKM di Kawasan PE dan tahun 2023 bertambah sebanyak 14 UMKM baru sehingga total menjadi 69 UMKM . Persentase pertumbuhan menjadi 25,45 %					
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2.71	4	1,9 hari	4	2.01	4
		Data lama tinggal wisatawan diperoleh dari rata-rata lama tinggal dari data kabupaten/kota yang masuk, karena tidak semua kabupaten mengirimkan data lama tinggalnya.					
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.278.453	1,189,149	1.534.144	1,624,891	1.534.144
		Kunjungan wisatawan 1.624.891 orang yang terdiri dari wisman 319.573 orang dan wisnus 1.305.318 orang. Pertumbuhan dari tahun lalu mencapai 36,64 %					
4	Peningkatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset	563.092.000	800.000.000	233,596,000	1.000.000.000	469,262,880	1.000.000.000
		Pengelolaan aset masih belum mencapai target karena penerimaan dari pengelolaan aset 6 Kawasan PE belum dapat berkontribusi optimal. Pemasukan dari pendapatan PAD lain-lain yang sah sebesar Rp 2,350 Milyar belum terealisasi					
5	Persentase Pemenuhan Unsur 5A di Kawasan PE	-	80	71.43%	80	71.43%	80
		Unsur 5 A yang dipenuhi adalah Atraksi, Akomodasi, Amenitas dan Awarnes untuk 14 Kawasan PE yang sudah mendapat alokasi anggaran sampai 2022. Sementara untuk tahun 2023, alokasi anggaran untuk 7 PE dengan komponen 5 A Pariwisata yang diintervensi adalah Akomodasi dan Amenitas. Pemenuhan unsur 5A untuk 7 Kawasan PE lama sebesar 92,86 % , namun untuk 7 Kawasan PE yang baru hanya 28,57 % akibat keterbatasan anggaran tahun 2023. Total pemenuhan mencapai 71,43 %					

2. Saran Rekomendasi Tindak Lanjut

Memperhatikan kondisi capaian kinerja IKU yang masih rendah untuk 2 indikator yaitu Retribusi aset dan Lama tinggal wisatawan serta memperhatikan kondisi anggaran yang ada maka sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Koordinasi lebih lanjut dengan pihak kabupaten/kota khususnya kabupaten yang belum mengirimkan datanya. Pada saat bertugas di kabupaten dapat sekaligus menjadi agen pengumpul data (sistem jemput bola).
- Perbaiki sistem pengelolaan aset seperti penggunaan aplikasi pembayaran dan penilaian appraisal dari Badan Aset terhadap aset yang dikelola termasuk untuk aset 6 kawasan PE yang dikelola.
- Menyusun Profil Rencana Pengelolaan dan Pendapatan dari Aset yang dikelola Dinas Parekraf NTT

Kupang, 10 Januari 2024

Pt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Johny Rohi Lodo, SH

Pembina Tk. I

NIP 196707171993031016



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang – NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384

 parekrafntt.id  [Dinas Pariwisata Provinsi NTT](#)  [@disparekraf.ntt](#)  [@disparekrafNTT](#)  [Dinas Parekraf NTT](#)